

**KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN DAN DETERMINANNYA:
ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2010-2018**



**Disusun sebagai salah satu syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

FAJAR FIRDAUS

B 300160215

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN DAN DETERMINANNYA:
ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2010-2018**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FAJAR FIRDAUS

B 300160215

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Surakarta, 6 Mei 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anas', written in a cursive style.

(Muhammad Anas, SE., M.Si.)



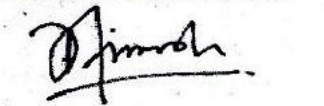
HALAMAN PENGESAHAN
KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN DAN DETERMINANNYA:
ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2010-2018

OLEH
Fajar Firdaus
B 300 160 215

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Sabtu 14 Mei 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Muhammad Anas, SE., M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Siti Aisyah, SE., M.Si.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Siti Fatimah N, SE., M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, MM
NIK. 017025701


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Mei 2020

Penulis



FAJAR FIRDAUS
B 300160215

KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN DAN DETERMINANNYA: ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2010-2018

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, pekerjaan, pendapatan dan sebagainya. Agar kemiskinan dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jumlah pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita, serta investasi PMA dan PMDN terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten tahun 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel sebagai alat analisis. Berdasarkan hasil analisis regresi, ditemukan bahwa jumlah pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu variabel pendapatan perkapita serta investasi PMA dan PMDN tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten. Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil adalah meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembukaan lapangan kerja baru melalui penanaman modal investasi yang berbasis padat karya bukan hanya padat modal, sehingga dapat meningkatkan tingkat penghasilan masyarakatnya.

Kata kunci: Kemiskinan, pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita, PMA, PMDN, data panel

Abstract

Poverty is a complex problem because it involves various aspects such as the right to fulfill food, employment, income and many more. For poverty to decline, it requires support and cooperation from the community and the seriousness of the government in dealing with this problem. This study aims to analyze the effect of unemployment, government spending, income per capita, and foreign investment and domestic investment on poverty levels in Banten province in 2010-2018. This research is a quantitative research which applied panel data regression analysis. Based on the results, it was found that the level of unemployment had a positive effect on poverty levels, while government spending had a significant negative effect on poverty. However, per capita income and FDI and domestic investment did not affect poverty levels in Banten province. Policy recommendations that can be taken are to increase economic growth and the opening of new jobs through investment-based investment that are labor intensive not just capital intensive, so that it can increase the level of people's income.

Keywords: poverty, unemployment, government spending, per capita income, foreign investment, domestic investment, panel data

1. PENDAHULUAN

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut World Bank (2004), kemiskinan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh banyak negara khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.

Menurut Suparlan (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat menghambat kesejahteraan dan peradaban. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2005). Menurut Sukirno (2000), pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran dapat menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Selain pengangguran, pengeluaran pemerintah juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi disuatu daerah. Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta (Suparmoko, 1998). Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan

perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja, namun juga mempertimbangkan bagaimana efeknya akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kunci dari penurunan kemiskinan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan PDRB di suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk saat periode pendapatan tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan per kapita suatu wilayah, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan suatu daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakatnya, pemerintah tidak dapat melakukannya secara sendiri karena keterbatasan modal yang dimiliki. Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional yang merupakan pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian nasional. Meningkatnya kegiatan perekonomian sangat tergantung kepada aliran modal bagi usaha produktif (Syahputra, Hamzah, dan Nasir, 2017).

2. METODE

Jenis dan Sumber Data, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain: Data jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Banten tahun 2010-2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi provinsi di Banten tahun 2010-2018. Data jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2018 yang bersumber dari Badan Pusat

Statistik tahun 2010-2018. Data pengeluaran pemerintah di Provinsi Banten tahun 2010-2018 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui publikasi realisasi APBD kabupaten-kabupaten di Provinsi Banten tahun 2010-2018. Data pendapatan per kapita kabupaten-kabupaten di provinsi Banten tahun 2010-2018 yang telah diolah dari jumlah PDRB dengan jumlah penduduk di kabupaten-kabupaten Banten yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Banten 2010-2018. Data investasi kabupaten-kabupaten di provinsi Banten tahun 2010-2018 yang diperoleh dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabupaten-kabupaten di Provinsi Banten tahun 2010-2018.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman maka model yang terpilih untuk digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil estimasi *Random Effect Model* (REM) terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi *Random Effect Model*

$$\text{POV}_{it} = 5,130 + 0,120 \text{ UNEMP}_{it} - 0,000 \text{ GOV}_{it} - 0,006 \text{ PDRBP}_{it} + 0,000 \text{ PMA}_{it} + 0,000 \text{ PMDN}_{it}$$

(0,001)*	(0,000)*	(0,027)**	(0,543)	(0,249)	(0,696)
----------	----------	-----------	---------	---------	---------

$$R^2 = 0,480 ; \text{DW-Stat} = 1,570 ; \text{F-Stat} = 10,715 ; \text{Sig F-Stat} = 0,000$$

Uji Diagnosis

1. Multikolinieritas R squared (Uji Klein)

$$\text{UNEMP} = 0,226 ; \text{GOV} = 0,446 ; \text{PDRBP} = 0,498 ; \text{PMA} = 0,532 ; \text{PMDN} = 0,545$$

2. Normalitas Residual (Jarque-Bera)

$$\text{JB}(2) = 2,481 ; \text{Prob. JB}(2) = 0,289$$

3. Heteroskedastisitas Prob-t (Uji Glejser)

$$\text{UNEMP} = 0,220 ; \text{GOV} = 0,447 ; \text{PDRBP} = 0,847 ; \text{PMA} = 0,559 ; \text{PMDN} = 0,834$$

*signifikan pada $\alpha 0,01$ **signifikan pada $\alpha 0,05$ ***signifikan pada $\alpha 0,1$

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik

Berdasarkan Tabel di atas diketahui nilai signifikansi empirik statistik F pada estimasi REM memiliki nilai 0,000 ($< 0,01$) sehingga H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah model yang dipakai dalam penelitian eksis. Selain itu hasil estimasi REM juga menunjukkan uji validitas pengaruh (uji t) yang telah diuraikan

di atas terlihat bahwa ada dua variabel independen yang berpengaruh signifikan dan ada tiga variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan pada REM. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah tingkat pengangguran dan pengeluaran pemerintah sedangkan tingkat pendapatan per kapita, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan.

Variabel pengangguran memiliki koefisien regresi sebesar 0,120. Pola hubungan antara pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk miskin adalah linier-linier sehingga apabila tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1% maka presentase penduduk miskin akan naik sebesar 0,120%. Sebaliknya apabila jumlah pengangguran terbuka turun sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,120%.

Variabel pengeluaran pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar - 0,0001. Pola hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan jumlah penduduk miskin adalah linier-linier sehingga ketika pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 miliar Rupiah maka presentase penduduk miskin hampir tidak berkurang.

Sebagai salah satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kenaikan tingkat pengangguran akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Sukirno (2004) yang menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fadlillah, Sukiman, dan Dewi (2016) yang menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang akan berdampak bertambahnya angka kemiskinan. Jika dikaitkan dengan pendapat Nurkse pada teori lingkaran setan kemiskinan yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu sebab kemiskinan,

penelitian ini memiliki hasil yang sejalan. Pengganguran bisa diartikan sebagai tingkat produktivitas seseorang yang rendah atau bisa juga tidak melakukan produktivitas sama sekali. Hal ini karena penggangur tidak memiliki suatu pekerjaan untuk menghasilkan upah ataupun gaji. Padahal sebagian besar rumah tangga bergantung dari gaji / upah yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Hasil uji validitas pengaruh membuktikan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut berarti ketika pengeluaran pemerintah meningkat maka tingkat kemiskinan di setiap daerah di Provinsi Banten akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap rancangan APBD di Provinsi Banten selalu mengalami kenaikan mulai dari belanja daerah langsung maupun tidak langsung serta pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah di setiap daerah demi kemajuan di setiap daerah tersebut. Aktivitas pemerintah serta pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Hasil Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Fithri & Kaluge (2017) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, karena banyak pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah tidak tepat sasaran dan tidak berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan.

Pendapatan per kapita seharusnya memiliki hubungan terbalik dengan tingkat kemiskinan. Jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik sehingga tingkat kemiskinan akan turun karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan sebaliknya jika pendapatan turun maka konsumsi akan turun sehingga tingkat kemiskinan akan naik karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun hasil uji validitas menyatakan bahwa naik atau turunnya PDRBP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wirawan & Arka

(2015) yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2007-2013. Mereka menyatakan bahwa kenaikan pendapatan belum merata keseluruh masyarakat di Provinsi Bali sehingga menimbulkan gap / kesenjangan sosial. Tidak berpengaruhnya PDRB per kapita terhadap kemiskinan di Provinsi Banten ini dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis data pertumbuhan tingkat pendapatan per kapita di Provinsi Banten tahun 2011-2018.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian dari Agustini (2017) yang menemukan bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat, ia menyatakan bahwa investasi memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa kenaikan atau penurunan penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PMA merupakan salah satu penopang terbesar dari pembangunan yang ada di Provinsi Banten, meskipun demikian nyatanya hal tersebut tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Sari (2012) yang menganalisis peran investasi terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2004-2010. Ia menyatakan bahwa peran investasi tidak dapat mengentaskan kemiskinan karena masih sedikitnya penyerapan tenaga kerja serta minimnya tingkat upah yang diterima pekerja sehingga tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

Tujuan awal dari sebuah investasi adalah meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Secara teoritis, PMDN adalah penggolongan modal, kekayaan masyarakat Indonesia baik perorangan atau badan hukum termasuk di dalamnya benda bergerak ataupun benda tak bergerak bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Pembangunan suatu bangsa memerlukan dana untuk melaksanakan investasi yang tidak sedikit jumlahnya.

Dalam pelaksanaannya investasi berlandaskan pada kemampuan sendiri, disamping memanfaatkan sumber-sumber lainnya.

Penelitian ini menghasilkan bahwa PMDN tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ernawati (2011) yang menemukan bahwa tidak signifikannya pengaruh PMDN dapat disebabkan investasi yang dilakukan kurang bersifat produktif yang melibatkan sedikit tenaga kerja, sehingga kurang mendorong atau menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kemiskinan masih menjadi masalah kontemporer yang sering terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Pengangguran merupakan salah satu indikator yang sangat erat pengaruhnya terhadap kemiskinan dengan tingginya kenaikan jumlah penduduk namun tidak diiringi dengan lapangan kerja yang sesuai sehingga akan berdampak meningkatnya kemiskinan. Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu fokus yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di setiap daerah sehingga pada setiap tahun pengeluaran pemerintah selalu mengalami kenaikan. Jika suatu daerah tingkat pendapatan per kapitanya tinggi, maka pertumbuhan ekonominya pun tinggi. Hal ini juga terjadi pada investasi yang mencakup PMA dan PMDN di Provinsi Banten selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, pendapatan per kapita dan PMA dan PMDN terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2018 dengan menggunakan model regresi data panel model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, selanjutnya pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu variabel PDRB per kapita, PMA, dan PMDN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.2 Saran

Karena tingginya tingkat investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten, pemerintah harus bisa menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah-daerah yang ada di Provinsi Banten agar dapat benar-benar di memaksimalkan potensi tersebut. Tidak hanya bertujuan untuk pertumbuhan dan pembangunan tetapi juga harus ada pemerataan pendapatan ekonomi dan tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan, sehingga antara pemerintah dan masyarakat dapat secara bersama-sama menurunkan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan sifatnya dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Yetty. 2017. *Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2017*, Vol. 6, No. 2, 97-119.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan Informasi Jumlah persentase penduduk miskin dan garis Tahun 2010-2018 (Persen). Di Provinsi Banten.
- Ernawati. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Nasioanal di Indonesia Tahun 2005-2009*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Fadlillah, N., Sukiman dan Dewi, A.S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 11, No. 1, Maret 2016.
- Fithri, N., & Kaluge, D. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017.
- Nanga, M. 2005. *Makroekonomi : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Paramita, A.A. I. D., Purbadharmaja, I. B.P. (2015). Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Pprovinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.4, No.10 Oktober 2015.
- Sari, Dyah Puspita. 2012. *Peran Investasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Lampung tahun 2004-2010*. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Jawa Barat.

- Sukirno, S. 2000. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Suparmoko, 1998. "Pengantar Ekonomi Makro". BPFE-UGM Yogyakarta.
- Syahputra, D., Abubakar Hamzah., Muhammad Nasir. 2017. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga Riil, dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Investasi Swasta di Indonesia (Pendekatan Error Correction Model). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 3 No 1.
- Wirawan, I. M. T, Arka, S. 2015. Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB perkapita, dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 5, Mei 2015.
- World Bank. 2004. *Global Poverty Report*.